



Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan Penganggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung

Syabina Fatwa Azzahra*

Universitas Teknologi Digital, Bandung

Aceng Kurniawan

Universitas Teknologi Digital, Bandung

Alamat: Jl. Cibogo No. Indah 3.Mekarjaya Kec Rancasari, Kota Bandung, Jawa Barat, 40000

Korespondensi penulis: syabina10221234@digitechuniversity.ac.id

Abstract. This study aims to examine the effect of the Regional Government Accounting System and Performance-Based Budgeting on the Performance Accountability of the Regional Government in Bandung Regency. Using a quantitative approach, the data were collected through questionnaires distributed to 88 respondents across 22 local government organizations (OPD). The data were analyzed using multiple linear regression to determine both partial and simultaneous influences. The findings show that both variables have a significant and positive effect on performance accountability, with the accounting system having a more dominant influence. This implies that improving financial reporting and aligning budgets with measurable performance can enhance transparency, efficiency, and accountability in public sector governance. The study provides theoretical insight and practical recommendations for strengthening public financial management systems.

Keywords: Regional Government Accounting System, Performance-Based Budgeting, Performance Accountability, Local Government, Bandung Regency

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan Penganggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah di Kabupaten Bandung. Menggunakan pendekatan kuantitatif, data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada 88 responden dari 22 organisasi perangkat daerah (OPD). Analisis dilakukan dengan regresi linier berganda untuk melihat pengaruh secara parsial dan simultan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua variabel berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja, dengan sistem akuntansi menunjukkan pengaruh yang lebih dominan. Temuan ini mengimplikasikan bahwa peningkatan kualitas pelaporan keuangan dan penyelarasan anggaran dengan kinerja terukur dapat meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam tata kelola sektor publik. Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dan rekomendasi praktis dalam memperkuat sistem pengelolaan keuangan pemerintah.

Kata kunci: Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Penganggaran Berbasis Kinerja, Akuntabilitas Kinerja, Pemerintah Daerah, Kabupaten Bandung.

LATAR BELAKANG

Transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip dasar dalam tata kelola keuangan daerah. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) dirancang untuk menghasilkan laporan keuangan yang andal dan tepat waktu. SAPD diterapkan berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Marwah Yusuf, 2021). Sistem akuntansi pemerintahan daerah diperlukan untuk

mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas keuangan di lingkungan instansi pemerintah daerah (Kurniawan & Purwanti, 2020).

Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) mengaitkan dana yang dialokasikan dengan hasil yang ingin dicapai. Pendekatan ini meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran (Manta, 2020). PBK juga mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan perencanaan dan pelaksanaan anggaran pemerintah (Yap & Riningsih, 2023).

Namun, implementasi SAPD dan PBK di Kabupaten Bandung belum maksimal. Berdasarkan Laporan BPK RI Tahun 2023, 40% OPD belum memenuhi standar pelaporan SAPD. Selain itu, 60% program PBK belum memiliki indikator kinerja yang terukur. Hal ini berdampak pada lemahnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah (Hendrik Latief et al., 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh SAPD dan PBK terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Studi ini penting karena mengisi celah penelitian sebelumnya yang hanya membahas salah satu variabel secara terpisah. Dengan demikian, hasilnya diharapkan dapat memperkuat literatur dan praktik tata kelola sektor publik (Winda Muslimah, 2024).

KAJIAN TEORITIS

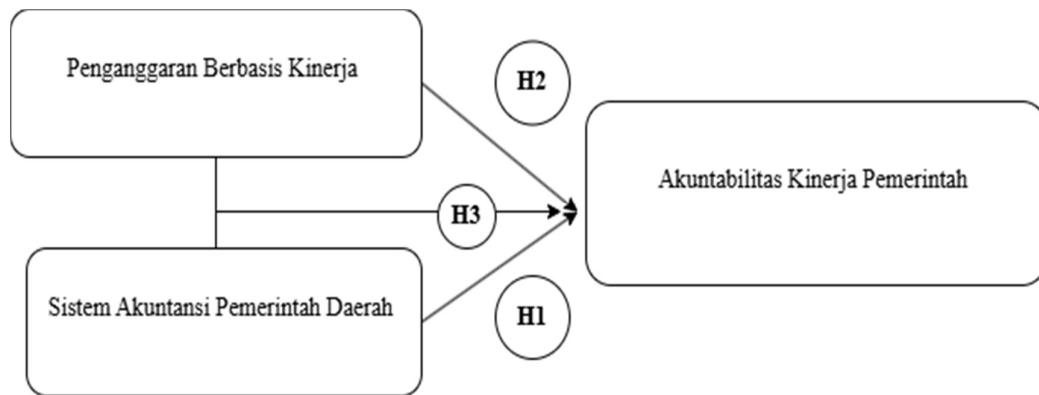
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD)

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) merupakan rangkaian proses mulai dari pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasian, hingga penyajian laporan keuangan pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip akuntansi berbasis akrual (Marwah Yusuf, 2021). SAPD menjadi alat penting untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik (Winda Muslimah, 2024).

Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK)

Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) adalah pendekatan anggaran yang mengaitkan pendanaan dengan capaian kinerja berupa output dan outcome (Manta, 2020). Penganggaran berbasis kinerja menekankan pada pencapaian output dan outcome dari suatu program, sehingga anggaran yang dialokasikan dapat dipertanggungjawabkan

secara nyata melalui hasil yang dicapai (Purwanti & Sya'adah 2021). PBK memfokuskan proses anggaran pada pencapaian hasil, bukan hanya besarnya input yang digunakan (Yap & Riningsih, 2023). Sistem ini bertujuan mendorong efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran publik (Situmorang et al., 2023).



Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah

Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan program kepada publik melalui indikator kinerja yang dapat diukur secara objektif (Marwah Yusuf, 2021). Akuntabilitas menjadi elemen penting dalam sistem pelaporan kinerja instansi pemerintah dan mencerminkan kualitas tata kelola sektor publik (Hendrik Latief et al., 2023). Penyusunan laporan keuangan yang belum sesuai standar menunjukkan perlu adanya peningkatan sistem akuntansi di berbagai unit, termasuk pemerintah daerah (Hidayat & Kurniawan, 2024)

Penelitian sebelumnya oleh Yap dan Riningsih (2023) menunjukkan bahwa penganggaran berbasis kinerja mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas anggaran. Sementara itu, studi Winda Muslimah (2024) membuktikan bahwa penerapan SAPD yang sesuai standar dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah. Keduanya terbukti berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah. Penerapan sistem akuntansi berbasis akrual diharapkan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan akuntabilitas kinerja (Kurniawan & Nensih, 2022).

Berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya, dapat diasumsikan bahwa SAPD dan PBK memiliki kontribusi penting dalam membentuk akuntabilitas kinerja. Hubungan ini belum banyak dikaji secara simultan dalam satu model penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menelaah keterkaitan ketiga variabel tersebut secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD)

Sistem akuntansi pemerintah daerah (SAPD) memiliki peran penting dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah melalui proses pencatatan, pengklasifikasian, dan pelaporan keuangan yang akurat dalam pelaksanaan APBD. Kualitas SDM juga menentukan efektivitas SAPD dalam menunjang akuntabilitas (Anggraini, 2024). SAPD terbukti berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah (Yusuf, 2021).

H1: Penerapan SAPD berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK)

Penganggaran berbasis kinerja merupakan sistem anggaran yang menekankan keterkaitan antara dana yang digunakan dengan hasil (output/outcome) yang dicapai. Penerapan PBK meningkatkan akuntabilitas instansi pemerintah, khususnya dalam perencanaan dan pelaporan anggaran (Ulandari & Widajantie, 2021). Semakin tinggi penerapan PBK, semakin tinggi pula akuntabilitas kinerja pemerintah (Yusuf, 2021).

H2: Penerapan PBK berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

Pengaruh Gabungan SAPD dan PBK

Akuntabilitas kinerja pemerintah menuntut transparansi dalam laporan keuangan dan efektivitas pengelolaan anggaran. SAPD dan PBK berperan penting dalam konversi transaksi ke dalam data laporan pertanggungjawaban yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik (Yusuf, 2021).

H3: Penerapan SAPD dan PBK secara bersama-sama berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif karena berfokus pada pengujian hubungan antar variabel melalui data numerik (Ali et al., 2022). Metode kuantitatif cocok untuk menguji pengaruh sistem akuntansi dan penganggaran terhadap akuntabilitas kinerja (Azhari et al., 2023). Data diolah menggunakan uji regresi linier berganda untuk mengetahui pengaruh simultan dan parsial antar variabel.

Populasi dalam penelitian ini adalah 22 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Bandung yang terlibat dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran (Nur Fadilah Amin et al., 2023). Sampel diambil dengan teknik purposive sampling berdasarkan kriteria jabatan strategis dalam pengelolaan keuangan (Nur Fadilah Amin et al., 2023). Total responden dalam penelitian ini adalah 88 orang yang mewakili sub bagian keuangan, UPT, administrasi, dan tenaga ahli.

Teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner tertutup berbasis skala Likert 5 poin (Anggraini et al., 2022). Kuesioner disusun berdasarkan indikator variabel yang telah dioperasionalkan sebelumnya, mencakup sistem akuntansi pemerintah daerah, penganggaran berbasis kinerja, dan akuntabilitas kinerja (Miftahul Janna, 2020). Setiap indikator diuji validitas dan reliabilitasnya sebelum digunakan untuk analisis data.

Model analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda (Kartika Dewi Anggraini, 2024). Variabel Y adalah akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, sedangkan X1 dan X2 masing-masing adalah sistem akuntansi pemerintah daerah dan penganggaran berbasis kinerja. Uji t digunakan untuk menguji pengaruh parsial, dan uji F digunakan untuk menguji pengaruh simultan (Miftahul Janna, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan pada 22 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Bandung dengan rentang waktu pengumpulan data antara Mei hingga Juni 2024. Peneliti menyebarkan 88 kuesioner kepada pejabat atau staf yang terlibat langsung dalam proses akuntansi dan penganggaran daerah. Seluruh kuesioner berhasil dikembalikan dan layak

dolah, menunjukkan tingkat partisipasi responden yang tinggi serta relevansi topik penelitian terhadap peran dan fungsi yang mereka jalankan dalam organisasi masing-masing .

Instrumen penelitian diuji validitas dan reliabilitasnya sebelum digunakan untuk analisis. Hasil uji validitas menunjukkan bahwa semua item pernyataan dalam kuesioner memiliki nilai r-hitung yang lebih besar dari r-tabel sehingga seluruh item dinyatakan valid . Selanjutnya, hasil uji reliabilitas melalui nilai Cronbach's Alpha berada di atas 0,7 yang menandakan instrumen memiliki konsistensi internal yang baik untuk mengukur masing-masing variabel .

Teknik analisis data menggunakan regresi linier berganda untuk mengetahui pengaruh simultan dan parsial variabel sistem akuntansi pemerintah daerah (SAPD) dan penganggaran berbasis kinerja (PBK) terhadap akuntabilitas kinerja . Pengujian dilakukan dengan uji F untuk simultan dan uji t untuk parsial, serta didukung oleh pengujian koefisien determinasi guna mengetahui seberapa besar kontribusi dua variabel independen tersebut dalam menjelaskan variabel dependen .

Hasil uji simultan (uji F) menunjukkan bahwa SAPD dan PBK secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dengan nilai F-hitung sebesar 114,697 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 . Ini membuktikan bahwa penerapan dua sistem tersebut berperan penting dalam menciptakan pemerintahan yang akuntabel .

Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,732 menunjukkan bahwa 73,2% variasi dalam akuntabilitas kinerja dapat dijelaskan oleh variabel SAPD dan PBK, sedangkan sisanya sebesar 26,8% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian ini . Hal ini menunjukkan kekuatan model yang tinggi dalam menjelaskan fenomena akuntabilitas kinerja di Kabupaten Bandung .

Pada uji parsial, sistem akuntansi pemerintah daerah memiliki nilai t-hitung sebesar 6,807 dengan nilai signifikansi 0,000, yang berarti berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah . Dengan demikian, semakin baik pelaksanaan SAPD, maka semakin meningkat pula kualitas akuntabilitas pemerintahan .

Koefisien regresi variabel SAPD sebesar 0,607 juga menunjukkan pengaruh positif, yang berarti peningkatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah secara sistematis dan akrual akan meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi pemerintah . Hasil ini sejalan dengan penelitian Marwah Yusuf (2021) yang menekankan pentingnya SAPD dalam mendukung transparansi dan pertanggungjawaban publik.

Sementara itu, variabel penganggaran berbasis kinerja memiliki nilai t-hitung sebesar 3,573 dengan signifikansi 0,001 yang berarti berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah . Artinya, semakin terstruktur dan berorientasi hasil suatu penganggaran, maka semakin tinggi pula tingkat akuntabilitas kinerja yang dicapai oleh pemerintah daerah .

Koefisien regresi untuk variabel PBK sebesar 0,333 menunjukkan arah hubungan positif. Hal ini membuktikan bahwa penganggaran yang dilandasi oleh ukuran kinerja (output dan outcome) berperan dalam peningkatan efisiensi penggunaan anggaran publik . Penelitian ini mendukung hasil studi Manta (2020) dan Situmorang et al. (2023) yang menyatakan bahwa PBK dapat mendorong kinerja birokrasi yang lebih akuntabel.

Dibandingkan PBK, SAPD memiliki pengaruh yang lebih dominan terhadap akuntabilitas kinerja, yang terlihat dari nilai koefisien regresinya yang lebih besar . Hal ini mengindikasikan bahwa integritas data keuangan dan ketepatan pelaporan melalui SAPD menjadi faktor yang lebih kuat dalam membentuk kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah. Sistem akuntansi pemerintah daerah berfungsi untuk memberikan informasi keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik secara transparan dan akuntabel (Kania & Purwanti, 2022).

Secara empiris, hasil ini menunjukkan bahwa penerapan SAPD harus menjadi prioritas dalam sistem pengelolaan keuangan daerah. Konsistensi dalam menerapkan prinsip akuntansi berbasis akrual menjadi kunci dalam penyajian informasi keuangan yang andal, relevan, dan dapat dibandingkan antar periode. SAPD juga mendukung evaluasi program berbasis data yang akurat.

Penganggaran berbasis kinerja juga tetap memiliki peran penting, terutama dalam merencanakan program yang berdampak nyata bagi masyarakat. PBK memfokuskan belanja publik pada hasil, bukan hanya proses, sehingga memungkinkan pengambilan

keputusan yang lebih efisien dan tepat sasaran. Namun penerapan PBK masih memerlukan penguatan dari sisi indikator dan instrumen pengukur kinerja .

Dari hasil ini diketahui bahwa masih terdapat kendala dalam implementasi PBK, seperti kurangnya indikator kinerja yang spesifik dan terbatasnya kapasitas SDM dalam menyusun ukuran hasil program. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi aparatur dan kolaborasi lintas OPD perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan manfaat PBK.

Penelitian ini memperkuat temuan sebelumnya bahwa SAPD dan PBK merupakan elemen strategis dalam reformasi pengelolaan keuangan daerah (Winda Muslimah, 2024). Namun, kontribusi keduanya akan maksimal apabila didukung oleh budaya birokrasi yang akuntabel serta pengawasan yang efektif dari lembaga pengawas maupun masyarakat.

Implikasi teoritis dari penelitian ini adalah memperluas pemahaman tentang bagaimana integrasi SAPD dan PBK dapat membentuk sistem akuntabilitas yang lebih kuat di sektor publik. Penelitian ini juga memberikan kontribusi terapan dalam penyusunan kebijakan keuangan daerah yang berbasis data dan berorientasi hasil .

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada 22 OPD di Kabupaten Bandung, dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi pemerintah daerah (SAPD) dan penganggaran berbasis kinerja (PBK) berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, baik secara simultan maupun parsial. SAPD memiliki pengaruh dominan karena menyediakan dasar informasi keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. PBK juga berkontribusi positif dengan menekankan keterkaitan antara anggaran dan capaian kinerja. Temuan ini menunjukkan pentingnya sinergi antara pelaporan akuntansi dan proses perencanaan anggaran yang berorientasi pada hasil untuk meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah.

Saran

Pemerintah Kabupaten Bandung disarankan untuk meningkatkan kualitas penerapan SAPD melalui pelatihan rutin, evaluasi sistem, serta penguatan pengawasan internal agar informasi keuangan yang disajikan lebih akurat dan tepat waktu. Dalam hal penganggaran berbasis kinerja, diperlukan penguatan indikator kinerja yang terukur dan relevan di setiap OPD, serta pengembangan kapasitas SDM dalam merumuskan dan mengevaluasi capaian kinerja. Selain itu, partisipasi masyarakat dan kolaborasi antar pemangku kepentingan harus terus ditingkatkan untuk memperkuat akuntabilitas publik. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mempertimbangkan variabel lain seperti budaya organisasi dan kepemimpinan birokrasi yang juga memengaruhi akuntabilitas.

DAFTAR REFERENSI

- Anggraini, D., Andika, R., & Priyono, P. (2022). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Berbasis Kinerja pada Instansi Pemerintah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 11(3), 45–55. <https://doi.org/10.31294/jira.v11i3.13543>
- Azhari, A., Rahmat, R., & Fitriani, F. (2023). Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi dan Kompetensi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 8(1), 90–100. <https://doi.org/10.15408/ijies.v8i1.35000>
- Hendrik Latief, H., Ulfah, R., & Nasution, M. E. (2023). Pengaruh Kompetensi dan Pengawasan Internal terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Audit Publik*, 14(2), 124–137. <https://doi.org/10.28989/jaap.v14i2.3084>
- Hidayat, T. P., & Kurniawan, A. (2024). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan EMKM Pada CV. Optikal Raya. *Jurnal Frima*. 7. 1-12.
- Kartika Dewi Anggraini. (2024). Pengaruh Sistem Akuntansi dan Audit Internal terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 10(1), 31–42. <https://doi.org/10.37641/jiak.v10i1.1919>
- Kania, T., & Purwanti, M. (2021). Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Sindang Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka. *Jurnal Frima*, 4, 153-164.
- Kurniawan, A., & Nensih, C. (2014). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Saling Ketergantungan Terhadap Karakteristik Informasi Akuntansi Manajemen Serta Dampaknya Terhadap Kinerja Manajerial. *Jurnal STAR – Study & Accounting Research*, 11(1), 52–67.
- Kurniawan, A., & Purwanti, M. (2017). Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Sistem Informasi Akuntansi Dan Dampaknya Terhadap Kualitas Informasi Akuntansi. *Jurnal STAR – Study & Accounting Research*, 14(2), 1–12.
- Manta, F. (2020). The Role of Performance-Based Budgeting in Improving Public Sector Accountability. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 11(2), 65–73. <https://doi.org/10.24832/jekp.v11i2.1317>
- Marwah Yusuf. (2021). Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dalam Perspektif Standar

- Akuntansi Pemerintahan. *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis*, 8(2), 112–124. <https://doi.org/10.29259/jiab.v8i2.10225>
- Purwanti, M. & Sya'adah, I. N., (2020). Pengaruh Rasio Profitabilitas dan Rasio Likuiditas Terhadap Financial Distress. *Jurnal Frima*, 3, 36–48.
- Miftahul Janna. (2020). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dan Penganggaran terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 5(2), 97–105. <https://doi.org/10.31294/jab.v5i2.8372>
- Nur Fadilah Amin, R., Prasetyo, A., & Wulandari, R. (2023). Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan Gaya Kepemimpinan terhadap Akuntabilitas Pemerintah Daerah. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 8(3), 147–157. <https://doi.org/10.15408/jrak.v8i3.36834>
- Situmorang, D. D. P., Erlina, & Sirojuzilam. (2023). Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Efektivitas Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 14(1), 67–81. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2023.14.1.5>
- Syabina. (2024). Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan Penganggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung (Skripsi). Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
- Winda Muslimah. (2024). Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Akuntabilitas Publik. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 9(1), 23–34. <https://doi.org/10.29259/jakd.v9i1.3019>
- Yap, M. & Riningsih, A. (2023). Evaluasi Penganggaran Berbasis Kinerja dalam Meningkatkan Efektivitas Pemerintahan Daerah. *Jurnal Tata Kelola Pemerintahan*, 7(2), 42–55. <https://doi.org/10.30996/jtkp.v7i2.3781>
- Ali, M., Firdaus, R., & Sari, D. (2022). Pendekatan Kuantitatif dalam Penelitian Ekonomi Publik. *Jurnal Riset Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 15(1), 18–25. <https://doi.org/10.31294/jrek.v15i1.27129>